

MUQODDIMA

JURNAL PEMIKIRAN DAN RISET SOSIOLOGI

VOL. 1 No. 2 DESEMBER 2020



Membaca Ulang 'Guncangan Besar' Francis Fukuyama
ENENG DAROL AFIAH

Sosiologi Sebagai *the Queen of Social Sciences*:
Sebuah Refleksi
RACHMAD K. DWI SUSILO

Stereotip Warga Tionghoa dalam Geopolitik
Hubungan Indonesia dengan Tiongkok
TAUFIK HIDAYADI
HENNY SAPTATIA DRAJATI NUGRAHANI

Antara Iman dan Kenikmatan:
Konstruksi Gagasan Pascamodernisme Ariel Heryanto
FARIZ ALNIZAR

Dinamika Pengelolaan Sumber Daya Air
di Situ Kemuning, Cimanggis Kabupaten Bogor
NANA KRISTIAWAN

Konsolidasi Demokrasi
Melalui Liga Santri Nusantara
INDHAR WAHYU WIRA HARJO

Dangdut Koplo: Tubuh, Seksualitas, dan Arena
Kekuasaan Perempuan
MOH. FAIZ MAULANA

Smoking Outcome Expectancy:
Pengetahuan, Perilaku, dan Konsekuensi Merokok
ELMY BONAFITA ZAHRO

MUQODDIMA

JURNAL PEMIKIRAN DAN RISET SOSIOLOGI



Editor in Chief

Eneng Darol Afiah, *Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta*

Managing Editor

Naeni Amanulloh, *Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta*

Editor

Amsar A. Dulmanan, *Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta*

Pangeran P.P.A. Nasution, *Universitas Malikussaleh*

Muhammad Nurul Huda, *Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta*

Muhammad Mustafid, *Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta*

Mujtaba Hamdi, *Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta*

Fikri Tamau, *Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta*

Hanifa Maulidia, *Sekolah Tinggi Imigrasi*

Dewi Anggraeni, *Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta*

Muhammad Nurun Najib, *Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta*

R.M. Joko P. Mulyadi, *Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta*

Moh. Faiz Maulana, *Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta*

Reviewer

Achmad Munjid, *Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, Indonesia*

Ahmad Suaedy, *Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, Jakarta, Indonesia*

Syamsul Hadi, *Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, Jakarta, Indonesia*

Moh. Yasir Alimi, *Universitas Negeri Semarang, Semarang, Indonesia*

Nadiatus Salama, *Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, Indonesia*

Anton Novenanto, *Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia*

Akhmad Ramdhon, *Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia*

Imam Ardianto, *Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia*

Achmad Fawaid, *Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia*

Fariz Alnizar, *Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, Jakarta, Indonesia*

Pajar Hatma Indra Jaya, *Universitas Islam Negeri Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia*

Ilustrasi Cover

'Menara Petunjuk', Shilfina Putri Widatama

MUQODDIMA: Jurnal Pemikiran dan Riset Sosiologi diterbitkan oleh Laboratorium Sosiologi, Departemen Sosiologi, Fakultas Sosial dan Humaniora, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) Jakarta. Jurnal ini terbit dua kali setahun, yaitu pada Juni dan Desember.

MUQODDIMA: Jurnal Pemikiran dan Riset Sosiologi menyajikan karya-karya ilmiah di bidang sosiologi dan sosial humaniora. *MUQODDIMA: Jurnal Pemikiran dan Riset Sosiologi* mengarahkan diri pada kajian sosial-keagamaan, budaya, politik-ekonomi, serta isu-isu kemanusiaan dan lingkungan hidup baik yang dihasilkan dari penelitian lapangan maupun tinjauan kritis atas teori sosial. *MUQODDIMA: Jurnal Pemikiran dan Riset Sosiologi* mengundang para akademisi dan peneliti di bidang sosial humaniora, khususnya sosiologi, serta para praktisi/aktivis sosial untuk mengirimkan karyanya.



Alamat Editorial:

Kampus UNUSIA Jakarta
Jl. Taman Amir Hamzah No. 5
Jakarta Pusat 10430

Telp/Fax: (021) 315 6864 / 390 6501

E-mail: muqaddima.jms@unusia.ac.id

Website: <http://journal.unusia.ac.id/index.php/Muqoddima>

DAFTAR ISI

PENGANTAR EDITORIAL

- i-x | ENENG DAROL AFIAH
Membaca Ulang 'Guncangan Besar' Francis Fukuyama

ARTIKEL

- 113-132 | RACHMAD K. DWI SUSILO
Sosiologi Sebagai *the Queen of Social Sciences*: Sebuah Refleksi
- 133-144 | TAUFIK HIDAYADI & HENNY SAPTATIA DRAJATI NUGRAHANI
Stereotip Warga Tionghoa
dalam Geopolitik Hubungan Indonesia dengan Tiongkok
- 145-164 | FARIZ ALNIZAR
Antara Iman dan Kenikmatan:
Konstruksi Gagasan Pascamodernisme Ariel Heryanto
- 165-180 | NANA KRISTIAWAN
Dinamika Pengelolaan Sumber Daya Air di Situ Kemuning,
Cimanggis Kabupaten Bogor
- 181-196 | INDHAR WAHYU WIRA HARJO
Konsolidasi Demokrasi Melalui Liga Santri Nusantara
- 197-210 | MOH. FAIZ MAULANA
Dangdut Koplo: Tubuh, Seksualitas,
dan Arena Kekuasaan Perempuan
- 211-230 | ELMY BONAFITA ZAHRO
Smoking Outcome Expectancy: Pengetahuan, Perilaku,
dan Konsekuensi Merokok

TELAAH BUKU

- 231-234 | MUHAMMAD NURUN NAJIB
Kembalinya Politik Identitas dan Identitas Nasional

Stereotip Warga Tionghoa dalam Geopolitik Hubungan Indonesia dengan Tiongkok

Taufik Hidayadi

Mahasiswa Doktoral Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia
Program Studi Akuntansi Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia
Email: taufik.hidayadi02@ui.ac.id

Henny Saptatia Drajati Nugrahani

Dosen S3 Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia
Email: henny.saptatia@ui.ac.id

Abstrak

Perkembangan Tiongkok yang sedemikian pesat memberikan implikasi terhadap hubungan regional di kawasan. Indonesia telah membuat kajian evaluasi dan perhitungan yang sedemikian rupa dari sudut geopolitik dan geostrategi yang dipahami sebagai kepentingan dan ketahanan nasional. Pertimbangan yang paling rasional dari politik luar negeri yang bebas aktif adalah dengan memperkuat hubungan bilateral Indonesia dan Tiongkok, bukan hanya dalam kemitraan biasa tetapi lebih pada hubungan dekat yang mempunyai implikasi ekonomi dan teknologi. Kondisi geopolitik dalam hubungan Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok yang dinamis dapat dilihat dalam hubungan kerjasama ekonomi investasi dimana Tiongkok adalah salah satu dari empat investor terbesar di Indonesia dalam lima tahun terakhir. Polemik Laut China Selatan serta terjadinya pandemi Covid-19 yang berasal dari Wuhan juga semakin menambah kedinamisan hubungan tersebut. Hubungan Indonesia dengan Tiongkok berlaku pasang surut sejak pengakuan berdirinya negara Republik Rakyat Tiongkok pada tahun 1949 sejak jaman Orde Lama sampai dengan Orde baru, serta kebijakan negara terhadap etnis Tionghoa setelah itu. Kebijakan seperti asimilasi yang berdasarkan *stereotype* terhadap kelompok etnis Tionghoa, telah meninggalkan celah yang lebar dalam kaitan hubungan antar negara dengan penduduknya serta sikap masyarakat Indonesia sendiri terhadap etnis Tionghoa dengan jelas terlihat saat kejadian reformasi 1998 dan belum cair sampai saat ini seperti terlihat pada kejadian Pilkada DKI Jakarta 2017.

Kata kunci: *Stereotip, Republik Rakyat Tiongkok, Tionghoa, geopolitik, hubungan Indonesia-Tiongkok*

Abstract

China's very rapid development has implications for regional relations in the region. Indonesia has made a false evaluation and calculation from a geopolitical and geostrategic point of view which is applied as a national policy and resilience. The most rational consideration of a free and active foreign policy is with the bilateral relations between Indonesia and China, not only in an ordinary partnership but more in close relations which have economic and technological implications. The geopolitical conditions in the dynamic relationship between Indonesia and the People's Republic of China can be seen in the investment economic cooperation where the People's Republic of China is one of the four largest investors in Indonesia in the last five years. The South China Sea polemic and the Covid-19 pandemic that originated in Wuhan China also further added to the dynamics of the relationship. The relationship between Indonesia and the People's Republic of China has been ready to ebb and flow since the recognition of the establishment of the People's Republic of China in 1949, experiencing events such as the dual citizenship agreement, fluctuations in political ideology from the Old Order to the New Order, and state policies towards ethnic Chinese after that. Policies such as assimilation based on stereotypes towards the Chinese ethnic group have left wide gaps in the relationship between the state and its population as well as the attitude of the Indonesian people towards ethnic Chinese was clearly seen during the 1998 reformation, event appears not yet finished in resolving the problem, as seen in the 2017 DKI Jakarta Pilkada.

Keywords: *Stereotype, People's Republic of China, Chinese, geopolitic, Indonesia-China relations*

Pendahuluan

Perkembangan Tiongkok dan Ketegangan di Laut Cina Selatan

Kondisi geopolitik saat ini di kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara sangatlah dinamis. Banyak negara di kawasan ini sedang mengalami perubahan yang sangat cepat baik di dalam negeri maupun hubungan luar negerinya. Perubahan besar tersebut sebagai dampak perkembangan masing-masing negara di kawasan tersebut secara bersama-sama dan didorong perkembangan kekuatan ekonomi, politik teknologi dan militer yang berasal dari negara Republik Rakyat Tiongkok atau sering disebut Tiongkok saja.

Produktivitas Tiongkok yang didukung jumlah penduduk yang sangat besar, bahkan terbesar di dunia, sangat mengagumkan. Indikator ekonomi Tiongkok dalam berbagai ukuran terus bertumbuh bahkan melewati Jepang dan menyamai Amerika Serikat. *Multiplier effect* dari produktivitas tersebut berdampak pada negara di kawasan sekitarnya. Pusat-pusat pertumbuhan baru terus bermunculan di Tiongkok selatan seperti Senzhen, Hongkong, dan Macau. Untuk mendukung dan mempertahankan pertumbuhannya Tiongkok memerlukan semacam *lebensraum*, ekspansi bahan baku dan pasar serta mengamankan jalur logistiknya. Pada tahun 2013 telah diinisiasi *One Belt One Road*, suatu traktat kerjasama antara

Tiongkok dan negara-negara lain yang secara imajiner adalah apa yang disebut jalur sutra Tiongkok zaman dahulu, baik jalur darat maupun jalur laut. Kerjasama tersebut dimulai dengan negara Kazakhstan dan Indonesia yang masing-masing mewakili jalur sutra darat dan jalur sutra maritim (Yandry Kurniawan 2016).

Dalam perkembangan untuk memenuhi stabilitas wilayah teritorial dan mengamankan jalur *supply*-nya Republik Rakyat Tiongkok membuat pengumuman untuk mengklaim wilayah yang berada di sekitar kepulauan Spratly dengan memasukkan sembilan garis putus-putus atau *nine dash line* pada tahun 2009 (Adnan dan Shahid 2020). Sebenarnya klaim wilayah ini berasal dari klaim masa kekaisaran Tiongkok dan kemudian pemerintahan Republik Tiongkok memunculkan ide untuk meneruskan klaim tersebut setelah periode Perang Dunia Kedua, sebelum akhirnya pemerintahan nasionalis Tiongkok tersebut meninggalkan Tiongkok daratan dan menetap di wilayah kepulauan Taiwan sampai sekarang. Klaim itu kemudian diteruskan pemerintahan Tiongkok komunis yang menguasai Tiongkok daratan sekarang. Tindakan yang dilakukan Republik Rakyat Tiongkok ini memancing ketegangan dengan beberapa negara di ASEAN termasuk Indonesia. Ketegangan ini turut mempengaruhi Indonesia yang memiliki kawasan ZEE di sekitar wilayah tersebut.

Walaupun Indonesia tidak berperan sebagai negara pengklaim utama namun posisi Indonesia bisa memberikan penengah pada ketegangan tersebut, mengingat Vietnam dan Filipina sudah berada pada segregasi konflik dengan Tiongkok (Raharjo 2014). Hal lain dalam kaitan *nine dash line* adalah kepentingan Amerika Serikat pada kawasan ini dimana Amerika Serikat mencoba untuk mempertahankan hegemoninya di wilayah Asia Pasifik termasuk kepentingan pertahanan dan militer di kawasan Asia Tenggara. Lalu lintas perdagangan jalur laut juga menjadi kepentingan Amerika Serikat di seputaran wilayah Laut Cina Selatan (Bidara dan Mamentu 2018). Kunjungan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo tahun 2020 ini bahkan sampai memerlukan bertemu dengan salah satu badan otonom Nahdlatul Ulama yaitu Gerakan Pemuda Anshor dengan maksud untuk memberikan wacana tentang Tiongkok menurut versi Amerika Serikat terkait geopolitik di Asia Tenggara. Secara tersirat dari hal ini maka bisa dilihat peran dan posisi Indonesia sebagai negara terbesar di Asia Tenggara sangatlah diperhitungkan oleh dua kekuatan besar yang saat ini menguasai dunia yaitu Amerika Serikat dan Tiongkok. Tentu konsep politik Indonesia adalah tetap bebas aktif dalam menghadapi tarikan kepentingan dari kutub-kutub kekuatan dunia tersebut.

Pandemi Covid-19 dan Hubungan Indonesia-Tiongkok

Saat ini hampir semua negara disibukkan dengan adanya pandemi Covid-19. Pandemi yang berasal dari Wuhan, sebuah kota yang berada di propinsi Hubei Tiongkok tengah telah menjalar ke Asia Eropa dan Amerika. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menangani penyebaran virus ini seperti Pembatasan Sosial Bersekala Besar, *lockdown* atau merancang sistem kekebalan massal atau *herd community*. Pemilihan metode yang dilakukan negara-negara tersebut disesuaikan

dengan kondisi negara masing-masing terutama kondisi dan kekuatan ekonominya.

Tiongkok sendiri dengan kekuatan dan ketahanan ekonomi yang dimiliki, memilih melakukan tindakan yang cukup tegas dan efektif yaitu dengan mengunci atau *lockdown* kota Wuhan selama hampir dua bulan. Hasil dari keputusan *lockdown* tersebut membuat sebaran virus Covid-19 terhenti dan sekarang Tiongkok sudah bisa dikatakan selesai dalam memerangi pandemi tersebut. Tidak semua negara bisa melakukan tindakan seperti Tiongkok tersebut karena kendala dalam berbagai hal mulai dari sosial, politik, ekonomi, jumlah dan sebaran penduduk serta kemajuan teknologi kesehatan. Dalam kondisi seperti ini negara-negara yang mampu menunjukkan kemampuan kapasitas dan model kebijakannya akan mempunyai pengaruh geopolitik yang luas di dunia internasional (Kharisma 2020). Walaupun demikian pandemi ini diperkirakan tidak akan mengubah model dari perkembangan geopolitik yang telah ada atau bersifat lebih memperjelas dan mempertegas irisan kepentingan setiap entitas terutama di kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara.

Kecenderungan perkembangan Tiongkok yang sedemikian pesat memberikan implikasi terhadap hubungan regional di kawasan. Indonesia tentu telah mempunyai perhitungan yang sedemikian rupa dari sudut geopolitik dan geostrategi yang dipahami sebagai kepentingan dan ketahanan nasional. Pertimbangan yang paling rasional dari politik luar negeri yang bebas aktif adalah dengan memperkuat hubungan bilateral Indonesia dan Tiongkok, bukan hanya dalam kemitraan biasa tetapi lebih pada hubungan dekat yang mempunyai implikasi ekonomi dan teknologi. Tiongkok adalah salah satu dari empat investor terbesar di Indonesia dalam lima tahun terakhir. Pada kuartal empat tahun 2019 bahkan Tiongkok menjadi investor terbesar dan sampai Juli tahun 2020 Tiongkok menduduki posisi kedua sebagai investor terbesar di Indonesia setelah Singapura dengan nilai investasi US\$ 2,4 miliar yang mencakup 1.311 proyek (17,9%) (Putri 2020). Tetapi sampai saat ini Indonesia masih mengalami defisit perdagangan dari Tiongkok sejak tahun 2008 walaupun semakin mengecil defisit tersebut pada tahun ini pada periode Januari sampai Agustus 2020 karena tumbuh 6,4 persen atau meningkat US\$23,3 miliar (Aldila 2020).

Hubungan antara Indonesia dengan Tiongkok telah terjalin sejak tahun 1949 sejak Republik Rakyat Tiongkok yang berada di Tiongkok daratan dan berideologi komunis menyatakan berdirinya negara tersebut, berpisah sebagai negara tersendiri dari Republik Tiongkok yang berhaluan nasionalis dan sering disebut dengan Taiwan. Selama ini hubungan tersebut diwarnai pasang surut yang disebabkan berbagai hal. Pada saat Indonesia memperjuangkan kemerdekaan lepas dari Kerajaan Belanda, saat itu negara Tiongkok yang masih didominasi oleh kaum nasionalis lebih memilih mendukung keberadaan Belanda di Indonesia atau Hindia Belanda daripada mendukung republik Indonesia yang baru diproklamasikan. Sikap Taiwan ini di awal sebenarnya memilih netral untuk tidak berpihak kepada salah satu negara, diikuti anjuran kepada etnis Tionghoa yang berada di Indonesia saat itu agar juga bersikap netral. Hal ini ditunjukkan dengan cara mengibarkan bendera nasional Republik Tiongkok sebagai simbol

sikap netral. Anjuran tersebut dianggap normal mengingat Republik Tiongkok mempunyai pandangan bahwa etnis Tionghoa di Indonesia adalah sebagai bagian dari warga negara Republik Tiongkok. Kelak pengakuan kewarganegaraan ini diadopsi oleh Republik Rakyat Tiongkok dalam perjanjian dwikewarganegaraan dengan Republik Indonesia. Sikap pemerintah Tiongkok ini ke depannya membuat munculnya pandangan bahwa etnis Tionghoa tidak mempunyai keberpihakan kepada perjuangan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Lanjutan dari sikap pemerintah Republik Tiongkok ini adalah dukungan kepada Poh An Tui, sebuah laskar atau ormas yang dibentuk oleh etnis Tionghoa yang ada di Indonesia yang bertugas mengamankan warga etnis Tionghoa dari ancaman pendukung kemerdekaan Republik Indonesia (Zhou 2019). Poh an Tui sendiri dalam kegiatannya lebih sering bentrok dengan para pejuang Republik Indonesia dan berkawan dengan pemerintahan Belanda. Dalam kelanjutan hubungan ke depan antara Indonesia dan Tiongkok dimana dalam hal ini dilanjutkan oleh Republik Rakyat Tiongkok, masih diwarnai dengan berbagai tarik ulur baik antara dua negara yaitu Republik Indonesia maupun antara negara Republik Indonesia beserta etnis non Tionghoa dengan etnis Tionghoa sendiri yang kemudian memunculkan suatu sikap stereotip terhadap warga etnis Tionghoa.

Metode

Dalam artikel ini penulis menggunakan metodologi kualitatif dengan teknik studi literatur. Persoalan-persoalan akan didekati secara multidisiplin yaitu sejarah, politik, dan etnografi. Pada sebagian pokok tulisan penulis menggunakan pendekatan sejarah dimana adanya informasi data yang didapat dari sumber sekunder (Said 2019). Pendekatan lainnya yaitu etnografi digunakan seperti disebutkan Creswell bahwa asumsi dasar dari metode ini adalah bahwa manusia yang hidup bersama selalu menjadi hubungan dengan manusia, yang mana kemudian membentuk norma dan nilai yang menjadi pegangan dalam berinteraksi (Raco 2018). Pendekatan lain yang digunakan adalah pendekatan politik karena berkaitan dengan orientasi politik dari etnis Tionghoa pasca orde baru dan serta identitas politik etnis Tionghoa yang saat ini menguat (Suryani dan Ana Sabhana Azmy 2020).

Kondisi Zaman Orde Lama dan Orde Baru

Semenjak pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda tahun 1949 dan dalam tahun yang sama Republik Rakyat Tiongkok berdiri sebagai sebuah negara komunis yang berafiliasi dengan Uni Soviet, Republik Indonesia telah menjalin hubungan bilateral dengan Republik Rakyat Tiongkok dengan pemimpin tertinggi adalah Mao Zedong. Hubungan ini dilanjutkan sampai dengan perjanjian dwikewarganegaraan yang ditandatangani pada 22 April 1955 (Zhou 2019). Penandatanganan ini memberikan waktu bagi warga negara etnis Tionghoa selama dua tahun (1960-1962) menentukan pilihan kewarganegaraannya. Dalam konteks ini dapat dilihat bahwa sejak beberapa saat setelah periode kemerdekaan bangsa Indonesia telah mengalami fase yang cukup rumit yang berkaitan dengan

status kewarganegaraan etnis Tionghoa. Pada kenyataannya etnis lain yang ada di Indonesia tidak hanya Tionghoa, selain yang dianggap pribumi etnis-etnis lain yang dimaksud adalah etnis keturunan Arab dan keturunan Hindustan. Tentunya hal ini bisa dianggap sebagai awal mula sikap diskriminasi dan mulai munculnya stereotip yang ditujukan terhadap etnis Tionghoa.

Tahun 1960-an adalah periode menguatnya hubungan Indonesia dengan Republik Rakyat Tiongkok yang berhaluan komunis, sementara Indonesia belum mengakui Republik Tiongkok nasionalis, yang dibuktikan dengan diterimanya satu Tiongkok dalam Konferensi Asia Afrika yang dihadiri oleh wakil Republik Rakyat Tiongkok yaitu Zhou Enlai. Hubungan yang menguat dan saling akrab antara pimpinan Republik Rakyat Tiongkok dengan pimpinan Republik Indonesia Sukarno diikuti pula oleh keakraban pimpinan Partai Komunis Indonesia yang terlihat berkunjung menemui Mao Zedong sebulan sebelum peristiwa 30 September 1965.

Kedekatan Partai Komunis Indonesia dengan pimpinan Republik Rakyat Tiongkok ini kemudian menjadikan sikap sebagian besar rakyat Indonesia menaruh kecurigaan akan adanya semacam bantuan dan kerjasama terselubung antara Partai Komunis Indonesia dengan Republik Rakyat Tiongkok. Masyarakat Indonesia sebagian besar menolak ideologi komunis yang dianggap tidak beragama tersebut. Sementara sikap politik pimpinan Indonesia saat itu terkesan memberikan restu tentang kegiatan kegiatan Partai Komunis Indonesia, dimana tampak dalam salah satu perhelatannya membawa poster atau foto tokoh atau pemimpin ideologi komunis diantaranya foto Mao Zedong. Kondisi ini semakin diperparah dengan beredarnya berita bahwa Partai Komunis Indonesia berniat mengadakan pembentukan anggota semi militer yang dipersenjatai dan berasal dari kaum buruh dan tani diluar pasukan reguler Angkatan bersenjata Republik Indonesia. Anggota dari milisi tersebut nantinya akan diberi nama angkatan ke lima dan akan mendapatkan perlengkapan sebanyak seratus ribu pucuk senjata ringan dari Republik Rakyat Tiongkok. Berita ini semakin memperparah sikap antipati dari rakyat Indonesia non anggota Partai Komunis Indonesia. Setelah Gerakan 30 September 1965, banyak demonstrasi menyerang Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok yang dilakukan kalangan yang berasal dari luar Partai Komunis Indonesia. Bahwa saat itu tidak ditemukan bukti langsung keterlibatan negara Republik Rakyat Tiongkok tentang pengiriman senjata seperti sebelumnya telah diwartakan dalam media masa Indonesia saat itu, rakyat Indonesia tidak peduli (Zhou 2019).

Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan kepentingan dan tekanan politik untuk memberikan ruang pada sikap kemarahan rakyat Indonesia pada tahun 1967 membekukan hubungan diplomatik dengan Republik Rakyat Tiongkok sampai waktu yang tidak ditentukan. Bersamaan dengan itu para pelajar yang sempat dikirim ke luar negeri di zaman Presiden Sukarno ikut dilarang untuk kembali ke Tanah Air karena diperkirakan mereka telah mengalami perubahan orientasi ideologi atau minimal bersimpati kepada ideologi komunis. Para pelajar tersebut kebanyakan dikirim ke Eropa Timur dan beberapa di Tiongkok dan

Korea Utara. Sikap pemerintah yang tidak melakukan pemeriksaan bahkan langsung mencabut paspor para pelajar tersebut seakan bisa disamakan dengan sikap warga masyarakat Indonesia untuk langsung membuat stereotip bahwa Republik Rakyat Tiongkok akan sama saja terhadap warga dan negara Indonesia sikapnya yaitu masih trauma dengan pemberontakan partai komunis di tahun 1948 dan 1965 dimana yang terakhir dicurigai adanya keterlibatan dari Republik Rakyat Tiongkok.

Ketika Presiden Soeharto menduduki jabatannya dilaksanakanlah program asimilasi kepada etnis Tionghoa sebagai salah kebijakan politiknya. Semua hal yang berkaitan dengan Tionghoa atau Tiongkok ditutup atau dihentikan operasinya saat itu. Sekolah-sekolah yang menggunakan dan mengajarkan Bahasa Mandarin ditutup. Surat kabar yang menggunakan Bahasa Mandarin juga mengalami hal yang sama. Setiap warga etnis Tionghoa diminta menggunakan nama yang berasal dari budaya lokal Indonesia, sebagai bentuk dari program asimilasi (Suryadinata 2014) tak jarang maka terdengar aneh nama-nama yang dipakai berasal dari nama etnis Tionghoa yang diberi akhiran nama lokal seperti misalnya nama etnis Jawa, yang orang Jawa sendiri belum pernah menggunakan atau mengetahui maknanya. Proyek asimilasi yang paling berhasil adalah pelaksanaan ganti nama tersebut, sebab ganti nama dianggap sebagai simbol kesetiaan pada negara Republik Indonesia yang mulai digencarkan pada awal awal kekuatan politik Soeharto menguat pasca tahun 1965.

Selama antara tahun 1967 sampai dengan 1990 Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok praktis dalam kebekuan hubungan diplomatik. Sementara itu kegiatan etnis Tionghoa dibatasi dalam segala hal termasuk kegiatan politik. Jika ingin beraktifitas politik maka mereka diminta masuk ke partai yang sudah ada saat itu yaitu Partai Persatuan Pembangunan, Golongan Karya, dan Partai Demokrasi Indonesia. Untuk kegiatan keormasan mereka ditampung dalam wadah semacam badan komunikasi atau musyawarah yang berisi warga etnis keturunan Tionghoa. Untuk beberapa aktivis mereka bisa masuk dalam lembaga yang bernama *Centre of Strategic and International Studies* CSIS yang beberapa anggotanya berasal dari kalangan etnis Tionghoa. Hasil dari asimilasi ini bermacam-macam. Etnis Tionghoa menjadi relatif kehilangan kebudayaannya karena dikungkung oleh aturan yang ketat dalam mengekspresikan jati diri dan leluhurnya. Pada sisi lain mereka hanya dibolehkan untuk beraktifitas di dalam sektor ekonomi yang justru secara tidak sengaja justru memperkuat posisi mereka dalam sektor tersebut. Pada praktiknya para konglomerat dari etnis Tionghoa juga berhasil mengadakan simbiosis mutualisme dengan lingkaran utama kekuasaan saat itu. Posisi mereka yang diibaratkan sebagai sapi perah oleh kekuasaan terkadang juga menikmati keuntungan dengan dekatnya mereka pada lingkaran kekuasaan. Beberapa dari mereka mendapatkan informasi dan bantuan kemudahan dalam menjalankan bisnisnya tanpa susah-susah mengurus misalnya perijinaan, permodalan, dan keamanan seperti umumnya pengusaha lain. Pada saat Orde Baru tersebut di luar kekangan kebebasan mengekspresikan jati dirinya warga etnis Tionghoa mendapatkan manfaat karena kedekatan dengan penguasa. Kondisi ini tetap

berlangsung demikian di dalam negara walaupun pemerintah saat itu telah membuka normalisasi hubungan diplomatik dengan Republik Rakyat Tiongkok pada tahun 1990.

Kenyamanan tersebut tentunya banyak mendapat perhatian dari warga dan pengusaha pribumi, sikap itu menjadikan semacam iri hati karena kemudahan berusaha oleh kaum etnis Tionghoa terutama di kota-kota besar. Ada semacam kesenjangan jarak antara warga pribumi dan etnis Tionghoa. Warga pribumi tidak begitu saja percaya bahwa keberhasilan ekonomi etnis Tionghoa berdasarkan kerja keras mereka saja, tapi dimungkinkan adanya simbiosis mutualisme dengan pemangku kekuasaan dari atas sampai bawah. Hal ini terlihat bahwa bagi komunitas etnis Tionghoa di luar kota besar terkadang terdapat kelompok yang kondisi kehidupannya sangat rendah dari ukuran kesejahteraan ekonomi. Hal ini membuat anggapan warga pribumi bahwa adanya kelompok-kelompok etnis tersebut kelihatan sejahtera atau bahkan lebih kaya, hal itu ternyata tidak hanya hasil kerja keras saja tapi juga karena kedekatan dengan penguasa. Pada tahun 1998 terjadilah pergeseran kekuasaan di Republik Indonesia. Presiden Soeharto dipaksa turun dari jabatannya oleh rakyat. Saat itu pula terjadi kericuhan sosial dan kekerasan yang kemudian menjadikan banyak etnis Tionghoa menjadi korban. Seakan mereka menjadi pelampiasan kemarahan warga pribumi. Rumah dan tempat berusaha mereka dibakar oleh massa.

Hubungan Indonesia dengan Republik Rakyat Tiongkok Pasca Reformasi

Setelah reformasi kondisi berubah dengan kebijakan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang memperbolehkan warga etnis Tionghoa menggunakan identitasnya seperti memakai nama marganya dan memasukkan agama Konghucu sebagai salah satu agama resmi yang tercatat di dalam negara Republik Indonesia melalui Keppres No. 6 Tahun 2000 yang mencabut Inpres No. 14/1967 serta hari raya Imlek dijadikan salah satu hari libur nasional (Zuhri 2019). Dalam menyusun kabinet Gus Dur memasukkan salah satu tokoh Tionghoa yaitu Kwik Kian Gie sebagai Menteri Koordinator Ekonomi dan Industri, dimana hal ini belum pernah dilakukan pada kabinet di pemerintahan Presiden Soeharto dan B.J Habibie.

Terobosan-terobosan yang dilakukan Gus Dur ini tentunya melihat juga kondisi eksternal geopolitik di kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara dimana mulai nampak kebangkitan Tiongkok di bidang ekonomi. Sayangnya usia pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid tidak cukup panjang untuk meneruskan kebijakan yang membuka ruang partisipasi warga etnis Tiongkok selanjutnya. Walaupun demikian Gus Dur sempat membuat perjalanan ke Beijing untuk meyakinkan masyarakat Tionghoa di Tiongkok daratan maupun seluruh dunia bahwa pemerintahan Gus Dur adalah pemerintahan yang ramah terhadap etnis Tionghoa. Selain itu kunjungan ke Beijing ini juga merupakan usaha memperkuat diplomasi bidang ekonomi (Barton 2020).

Secara geopolitis dan geostrategis langkah Gus Dur mendekati Tiongkok dan India dipandang lebih asertif. Dalam kegunaannya sebagai penyeimbang

kekuatan antara Tiongkok dan Amerika Serikat (Zuhri 2019). Setelah Presiden Abdurrahman Wahid tidak menjabat, tonggak kebijakan dilanjutkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan menandatangani *Strategic Partnership* dengan Presiden Hu Jintao, serta di era Presiden Joko Widodo dengan menggandeng Tiongkok sebagai partner kerja ASEAN.

Stereotip Tionghoa Setelah Reformasi

Setelah reformasi selama lebih dari dua dekade apakah ada perubahan yang cukup signifikan pada komunitas etnis Tionghoa di luar bidang ekonomi yang mereka kuasai selama ini?

Dalam kehidupan politik, stereotip tersebut masih dialami oleh komunitas etnis Tionghoa seperti pada pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2017. Nuansa yang sangat terkesan SARA sangat terjadi pada kontestasi politik saat itu. Rupanya secara eksplisit hal tersebut masih berada dalam memori masing-masing kelompok. Stereotip sendiri adalah suatu keadaan dimana satu kelompok masyarakat mempunyai gambaran terhadap kelompok masyarakat lainnya yang mempunyai konotasi negatif. Konotasi negatif ini terkadang dengan mudah menyulut benturan sosial dari dua kelompok masyarakat tersebut. Konsep ini adalah bentuk penyederhanaan dari anggapan suatu kelompok terhadap atribut-atribut pribadi kelompok lain yang digeneralisasi yang bertujuan membedakan suatu kelompok dengan kelompok lainnya. Keadaan ini adalah semacam pandangan sepintas untuk memahami tentang kelompok lain dimana sering tidak mempunyai keakuratan, terlalu bersifat umum dan enggan menerima kondisi atau informasi yang baru. Akibatnya seseorang atau kelompok tidak presisi dalam membedakan sifat pribadi yang dimiliki seseorang dengan sifat umum dari kelompok orang tersebut. Dalam hal kasus hubungan antara penduduk yang disebut pribumi dan kelompok etnis Tionghoa stereotip yang muncul adalah bahwa kelompok ini dianggap tidak suka menjadi bawahan kelompok lain dalam dunia kerja atau bisnis, suka bekerja keras dan dianggap pelit dalam hal keuangan (Kuncoro 2008).

Secara historis, komunitas Tionghoa di Indonesia sudah mengalami *stereotyping* sebagai kelompok sosial yang paling eksklusif, pekerja keras, dan rajin tapi pelit; dan apolitis atau kurang nasionalis terhadap 'negara tuan rumah' mereka, Indonesia. Kebetulan ada sebuah penelitian bertujuan untuk meninjau, mencari tahu dan memeriksa kembali relevansi stereotip seperti itu dua puluh tahun setelah jatuhnya Presiden Suharto di 1998. Dengan menggunakan wawancara kualitatif yang dilakukan pada 2016 dan awal 2017, hal hal tersebut diuji secara akademis untuk memberikan gambaran tentang sikap masyarakat Tionghoa dan pribumi tentang hal tersebut.

Dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa meskipun beberapa stereotip lama masih bertahan, ada lebih sedikit rasialisasi dalam persepsi orang lain di antara orang non-Tionghoa dan Tionghoa. Stereotip yang mengakar dalam orang Tionghoa yang eksklusif, tidak loyal dan apolitis masih ada, tetapi analisisnya sedikit berbeda menunjukkan bahwa artikulasi stereotip sudah agak berkurang.

Kondisi ini terlihat bahwa anak muda Indonesia yang berpendidikan semakin menyadari bahwa stereotip berpotensi menimbulkan rasialisasi (Kuntjara and Hoon 2020).

Ruang Diskusi Argumentasi

Setelah sedikit melihat dari sisi sejarah, etnografi dan politik, kondisi ini memunculkan pertanyaan apakah sikap bangsa Indonesia secara umum masih melihat secara sepotong-potong tentang kebersamaan di dalam negara Republik Indonesia ini bahwa entitas etnis Tionghoa baik terkait dengan negara Republik Rakyat Tiongkok maupun negara Republik Tiongkok adalah sebuah keniscayaan yang sudah tidak perlu diperbaiki relasinya dengan kelompok-kelompok etnis lain? Apakah warga negara Indonesia non Tionghoa semakin merasa perlu untuk lebih membuka pembicaraan dan pemahaman dengan etnis Tionghoa? Demikian pula negara apakah selama ini sudah bersikap dalam proporsi yang tepat dalam menghadapi keragaman yang cukup unik ini, mengingat secara khusus etnis Tionghoa memiliki keterkaitan dengan kedua negara tersebut secara sangat unik dari sisi budaya maupun struktur sosial mereka, dimana kedua negara tersebut secara ideologi mempunyai haluan berbeda dan juga salah satunya relatif tidak diakui dunia. Selanjutnya adalah stereotip yang menjadikan anggapan terhadap etnis Tionghoa seperti di atas apakah perlu ditelaah kembali dan kemudian menjadikan bahan perbaikan dalam relasi sosial antara suku bangsa di Indonesia serta kebijakan-kebijakan negara.

Seperti diuraikan di atas pada beberapa kasus kebijakan negara semacam asimilasi adalah produk dari kebijakan negara yang bisa dianggap bersumber dari pandangan stereotip di atas. Implikasi dari kebijakan sebuah negara tentunya akan memberikan pengaruh pada banyak hal seperti politik, sosial, administrasi penduduk, dan ekonomi. Tekanan untuk pentingnya menguraikan dan mengevaluasi kondisi stereotip ini adalah bahwa adanya fakta keunikan jalinan sosial, sejarah, dan hukum kewarganegaraan antara etnis Tionghoa dengan negara leluhurnya baik itu Republik Rakyat Tiongkok maupun Republik Tiongkok di satu sisi dengan kondisi geopolitik dan geostrategi khususnya, mengingat perkembangan kemajuan dan kekuatan Republik Rakyat Tiongkok yang demikian pesat dan mempunyai pengaruh dalam tatanan kekuatan di kawasan Asia Tenggara pada sisi lainnya. Pada beberapa kasus kejadian seperti peristiwa reformasi tahun 1998 serta Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 yang mengakibatkan benturan budaya bahkan kekerasan fisik yang dialami oleh sebagian etnis Tionghoa, telah menjadikan hal ini sorotan yang serius dari negara leluhurnya. Kampus-kampus tertentu di negara Tiongkok yang mempunyai studi hubungan internasional, bahasa Indonesia dan warga Tionghoa di perantauan atau *overseas chinese* membuat kajian dan pemantuan secara akademik tentang hal ini yang dibahas dalam forum-forum ilmiah (Zuo 2018). Bahwa kemudian setelah reformasi Presiden Abdurrahman Wahid telah berusaha untuk membuka hubungan yang lebih hangat dan untuk menunjukkan keberpihakannya kepada etnis Tionghoa dengan cara membuat kebijakan pengakuan budaya dan agama yang dianut etnis

Tionghoa serta kunjungan resmi ke Beijing untuk menjelaskan sikap Indonesia kepada bangsa Tiongkok pasca reformasi tahun 1998, rasanya belum cukup untuk memperbaiki masalah stereotip dari sisi dalam negeri bangsa Indonesia. Relatif sedikitnya informasi khususnya tentang negara Republik Rakyat Tiongkok juga ditengarai ikut menambah pemahaman bangsa Indonesia tentang hal ini.

Penutup

Secara geopolitik pengaruh Republik Rakyat Tiongkok makin besar di kawasan Asia Tenggara. Hal yang sama juga terjadi pada Indonesia yang merupakan negara terbesar di kawasan ini. Tentunya dalam perspektif hubungan internasional yang bebas aktif dan mengedepankan kepentingan bangsa Indonesia akan memilih jalan yang semakin erat menjadikan Republik Rakyat Tiongkok keamatan itu bisa terjadi jika semua elemen yang terkait dengan hubungan kedua negara tersebut bisa saling membantu tanpa ada yang justru membuat saling lemah.

Pada kondisi Indonesia yang majemuk dan terdiri dari beberapa etnis, hubungan dengan etnis Tionghoa adalah yang paling dinamis baik dari sisi etnografi sejarah maupun politik. Padahal tantangan geopolitik yang ada justru terkait sangat erat dengan etnis Tionghoa dan negara Republik Rakyat Tiongkok. Jika kedua hubungan ini selaras maka hubungan geopolitik yang terjadi akan semakin erat dikarenakan bisa terbentuk pola pola diplomasi mulai dari negara dengan negara (*G to G, Government to Government*), perusahaan dengan perusahaan (*B to B, Business to Business*) maupun antar orang dari keduanya (*People to People*).

Namun bilamana sampai saat ini kedua bentuk hubungan tersebut masih belum bisa seiring, dan masih diwarnai pandangan stereotip antar etnis yang ada di Indonesia, sedang secara geopolitik kenyataannya antara kedua negara semakin erat maka hubungan tersebut boleh dikatakan dalam pernyataan: *“mesra di tingkat negara tapi rapuh di tingkat masyarakat”*.

Daftar Pustaka

- Adnan, Dr Mubeen, and Fakhara Shahid. 2020. "South China Sea Dispute: China's Role and Proposed Solutions." *Journal of Political Studies* 27(1):205.
- Aldila, Nindya. 2020. "Ekspor Indonesia Ke China Naik 6,4 Persen, Defisit Perdagangan Menciut." *Ekonomi Bisnis*. Retrieved (<https://ekonomi.bisnis.com/read/20201007/12/1302056/ekspor-indonesia-ke-china-naik-64-persen>).
- Barton, Greg. 2020. *Biografi Gus Dur*. A. Suaedy (editor). Yogyakarta: IRCiSoD.
- Bidara, Melita Angelin, and Michael Mamentu. 2018. "Kepentingan Amerika Serikat Dalam Konflik Laut Cina Selatan." *Jurnal Eksekutif* 1(1).
- Kharisma, Muhammad Waffaa. 2020. "Dunia Di Tengah Pandemi COVID-19: Perspektif Geopolitik." *Csis* (April):1–5.
- Kuncoro, Joko. 2008. "Prasangka dan Diskriminasi". *Fakultas Psikologi Unisula*. Semarang: Fakultas Psikologi. 1–16.
- Kuntjara, Esther, and Chang Yau Hoon. 2020. "Reassessing Chinese Indonesian Stereotypes: Two Decades after Reformasi." *South East Asia Research* 28(2):199–216.
- Putri, Cantika Adinda. 2020. "Investasi di RI Semester I: Singapura Juara & China Runner Up." *CNBC Indonesia*. Retrieved (<https://www.cnbcindonesia.com/news/20200722142637-4-174604/investasi-di-ri-semester-i-singapura-juara-china-runner-up>).
- Raco, Jozef. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia,.
- Raharjo, Sandy Nur Ikkal. 2014. "Peran Indonesia Dalam Penyelesaian Sengketa Laut Tiongkok Selatan." *Jurnal Penelitian Politik* 11(2):55–70.
- Said, Irwanti. 2019. "Hubungan Etnis Cina dengan Pribumi: Sebuah Tinjauan Sosiologis." *Jurnal Mimbar Kesejahteraan Sosial, Edisi 2 M 2*.
- Suryadinata, Leo. 2014. "Kebijakan Negara Indonesia Terhadap Etnik Tionghoa: Dari Asimilasi Ke Multikulturalisme?" *Antropologi Indonesia* 0(71):1–12.
- Suryani dan Ana Sabhana Azmy. 2020. "Political Identity and Multiculturalisme Strengthening Political Identity of Chinese in a Post New Order." *Perspektif* 9(2):183–94.
- Yandry Kurniawan. 2016. "One Belt One Road (OBOR): Agenda Keamanan Liberal Tiongkok." *Politica* 7:238.
- Zhou, Taomo. 2019. *Revolusi, Diplomasi, Diaspora: Indonesia, Tiongkok, Dan Etnik Tionghoa, 1945-1967*. Jakarta 10270.
- Zuhri, Ahmad Syaifuddin. 2019. *Islam Indonesia dan China: Pergumulan Santri Indonesia di Tiongkok*. Yogyakarta: Aswaja Nusantara Press.
- Zuo, Zhigang. 2018. *Blue Book of Indonesia No 2 Report On Economic and Social Development of Indonesia 2018 Trends and Challenges*. Social Sciences Academic Press (China).

Pedoman Penulisan

Naskah artikel ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris dengan panjang 5000-8000 kata. Lebih dari 8000 kata ditoleransi dengan catatan bahwa kelebihan tersebut sepadan dengan data, informasi, serta analisis dan diskusi yang dikerjakan. Naskah merupakan hasil penelitian maupun refleksi kritis atas sebuah pemikiran, teori, atau metodologi dalam sosiologi atau ilmu sosial secara umum. Penting diingat bahwa naskah yang diajukan tidak tengah dalam proses pengajuan atau dalam proses telaah (*review*) di jurnal lain. Pengajuan naskah artikel dilakukan melalui menu *submission* (pengajuan) di website <http://journal.unusia.ac.id/index.php/Muqoddima>.

Naskah ditulis dengan menggunakan font Book Antiqua pada program Microsoft Word, dengan ekstensi .doc, .docx, atau .rtf. Sistem penulisan secara umum adalah sebagai berikut:

Judul

Judul merefleksikan isi tulisan, singkat, padat dan diupayakan menarik minat pembaca. Font sebesar 20 poin, dengan huruf kapital di depan setiap kata (*Capitalized Each Word*) kecuali kata sambung. Panjang judul tidak lebih dari 10 kata. Hindari menggunakan tanda kurung (...) dalam judul.

Nama dan identitas penulis

Nama lengkap penulis dicantumkan tanpa gelar akademik, disertai keterangan institusi dan alamat email.

Abstrak dan kata kunci

Abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dengan panjang antara 150-250 kata. Abstrak seutuhnya ditulis dalam bentuk naratif memuat kajian, tujuan penelitian, metodologi, temuan, dan argumentasi. Kata kunci maksimal terdiri atas 6 (enam) kata/frasa.

Tubuh artikel

Tubuh artikel ditulis dengan ukuran huruf 11 poin, kecuali untuk sub judul (13 poin) dan catatan kaki (10 poin). Setiap awal paragraf ditulis menjorok ke dalam sepanjang 1 cm. Penggunaan kata-kata asing dituliskan secara miring (*italic*). Tubuh artikel memuat empat komponen pokok meliputi (1) pendahuluan, (2) metode/cara kerja, (3) analisis dan diskusi, dan (4) kesimpulan.

Catatan kaki

Catatan kaki dituliskan hanya jika diperlukan, yakni untuk memberikan keterangan tambahan atas suatu hal spesifik yang tidak sinambung secara langsung bila diletakkan sebagai bagian tubuh artikel. Hindari menggunakan catatan kaki jika berkenaan dengan sumber rujukan teoritis atau sumber data primer.

Daftar Pustaka

Daftar Pustaka ditulis dengan mengikuti standar format [ASA \(American Sociological Association\)](#). Format ASA juga berlaku dalam penulisan kutipan di tubuh artikel, termasuk

catatan perut dan catatan kaki (*note, footnote*).

Berikut ini adalah berupa contoh penulisan isi Daftar Pustaka:

Andreassen A., Bard. 2007. "Human Rights and Legal Empowerment of the Poor", *Extreme Poverty and Human Rights Expert Seminar*, Geneva 23-24 February 2007, Norwegian Centre for Human rights, University of Oslo.

Fatoni, Muhammad Sulton. 2015. *Kapital Sosial Pesantren (Studi Tentang Komunitas Pesantren Sidogiri Pasuruan Jawa Timur)*. Jakarta: Universitas Indonesia.

Geertz, Clifford. 1965. "Religion: Anthropological Study", dalam David L. Sills (ed.) *International Encyclopedia of the Social Sciences*. London: Collier-Macmillan Publishers.

Jones, Bobby L., Daniel S. Nagin, dan Kathryn Roeder. 2001. "A SAS Procedure Based on Mixture Models for Estimating Developmental Trajectories." *Sociological Methods and Research* 29 (3):374-93. Diakses pada 26 April 2005 (<https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0049124101029003005>).

Kukathas, Chandran. 2002. "Multiculturalism as Fairness: Will Kymlicka's Multicultural Citizenship." *Journal of Political Philosophy* 5(4):406-427. Diakses pada 27 Mei 2019. (<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1467-9760.00041>)

Keterangan lebih rinci terkait ketentuan penulisan dapat diperiksa dalam [Template Artikel MJPRS](#).





UNUSIA
LABORATORIUM
SOSIOLOGI

MUQODDIMA

JURNAL PEMIKIRAN DAN RISET SOSIOLOGI



9 772745 716003